

DAFTAR REFERENSI

- Abduh, H. (2009). *Peranan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta:
- Amalia, N. F. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 2(3).
- Arifin, J. (2006). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 8(2), 180-198.
- Arifiyadi, T. (2008). Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia. *September*, 10, 2009.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Arvitaningrum, R., & Taman, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran dan Persepsi Anggota Dewan Tentang Partisipasi Masyarakat terhadap Pengawasan APBD di Kabupaten Klaten. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 8(2), 224–238.
- Coryanata, I. (2011). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 12(2), 110–125.
- Dewi, I. M. (2011). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53–64.
- Handayani, S. (2020). *Pelibatan Masyarakat Marginal dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif*.
- Isma, C. (2014). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD), 12(2), 121–137.
- Kartikasari, D. (2012). Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali). *Accounting Analysis Journal*, 1(1).

- Kuddy, A. L. (2017). Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan Daerah dengan Gaya Kepemimpinan sebagai Pemoderating. *Jumabis: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1(1).
- Lambajang, A. A., Saerang, D. P. E., & Morasa, J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, dan Akuntabilitas Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, Goodwill, 9(1).
- Lastri, S., & Gunawan, B. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada Kantor DPR Aceh). *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM)*, 10(2).
- Manginte, S. Y., Sukoharsono, E. K. O. G., & Saraswati, E. (n.d.). (2015). Pengetahuan Anggaran serta Peran Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik dan Budaya Politik terhadap Pengawasan Keuangan Anggota DPRD.
- Maulana, Z. (2016). Persepsi Masyarakat terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Aceh Utara. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 5(2), 573–581.
- Merina, C. I., Verawaty, V., & Yolantri, A. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Bengkulu Selatan. *Prosiding Semhavok*, 1(1), 73-82.
- Pangesti, A. I. (2013). Analisis Pengetahuan Dewan tentang Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Menggunakan Variabel Moderating. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Peraturan Bupati Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Gampong dalam Kabupaten.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pramita, Y. D., & Andriyani, L. (2010). Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD). *Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto*.
- Putri, R. G. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja DPRK dalam Pengawasan Keuangan Daerah dengan Komitmen Profesional sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada DPRK Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 11-20.

- Safitri, L. A., & Sari, S. P. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dewan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah: Partisipasi Keterlibatan Masyarakat Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 7(2).
- Sari, D. U. (2016). Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada DPRD Kota/Kabupaten Solok). *Jurnal Akuntansi*, 4(1).
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. IKIP Semarang Press, Semarang.
- Setiawan, H. E., & Safri, M. (2016). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 51-72.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukoco, M. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. Tesis Studi Empiris Kota Malang.
- Sugiyono. (2006). *Psikologi Sosial*. Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Sulistoni, G. (2003). *Etika dalam Wujud Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah*. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/877>
- Suriansyah, M. (2014). *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sutriyanto, E. (2018). *Lakukan Tindak Pidana Korupsi Mantan Kepala BPBD Bireuen Ditangkap*. <https://www.Tribunnew.com/regional/2018/11/20>.
- Syamsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3(1), 21-28.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Penerbit Alfabeta.
- Teesen, G. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Kelurahan Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 1156.
- Tunggal, A. W. (2008). *Dasar-dasar Customer Relationship Management (CRM)*.: Harvindo, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Wijaksono, S. (2013). Pengaruh Lama Tinggal terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Permukiman. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 4(1), 24–32.

Yuliani, W.S. (2021). Pengaruh Latar Belakang Personal dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Kuantan Singingi). *Juhan Perak*, 2(2), 903–913.